

Determinan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang

¹Sri Rahayuningsih, ²Maria Maria, ³Darul Amri

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

¹srihayuningsih517@gmail.com

²mariamardjuki@polsri.ac.id

³darulamri2005@gmail.com

Abstract

This study is intended to determine the contribution of the Internal Control System (SPI), Regional Financial Accounting System (SAKD), and the use of information technology (TI) to the quality of financial reports in the Palembang city government. The study was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Palembang city as a reporting entity involving 65 employees as respondents. Respondents consisted of employees in the field of accounting, regional maintenance, asset management and regional budget fields. Sampling using saturated samples. This research show that the quality of financial reporting is influenced by the application of SPI, SAKD, and IT by 93.9%. These three factors also have an impact on the reliability of financial statements.

Keywords: SPI, SAKD, Information Technology, Financial Statements.

Abstrak

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui kontribusi Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi (TI) terhadap kualitas laporan keuangan kota Palembang. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang selaku entitas pelaporan dengan melibatkan 65 orang pegawai sebagai responden. Responden terdiri dari pegawai di bidang akuntansi, pembendaharaan daerah, pengelolaan aset dan bidang anggaran daerah. Pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Temuan menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi adanya penerapan SPI, SAKD, dan IT sebesar 93,9%. Ketiga faktor ini juga berdampak pada keandalan laporan keuangan.

Kata Kunci: SPI, SAKD, Teknologi Informasi, Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 71/2010. SAP, syarat mutlak laporan keuangan yang bermutu. Pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang akurat merupakan bukti tanggung jawab publik atas pengelolaan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan operasi, laporan arus kas, laporan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan adalah semua komponen dari satu set lengkap laporan keuangan. Efektivitas SPI merupakan elemen kunci dalam keandalan laporan keuangan. Menurut PP No.60/2008, melalui tahapan komprehensif dan aktivitas berkesinambungan dari atasan dan semua karyawan, SPI memastikan bahwa organisasi beroperasi secara efektif dan efisien, keuangannya dilaporkan secara akurat, asetnya dilindungi, dan sesuai peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit oleh BPK untuk mendapat pengakuan layak tidaknya sebuah laporan disandingkan dengan SAP.

Kelemahan SPI pada pemerintah daerah yang sering menjadi temuan berulang antara lain:

1. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan belum diselenggarakan dengan memadai, Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan meliputi semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dinilai dengan uang termasuk semua hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Bidang perbendaharaan kadang-kadang belum memiliki standar baku kebijakan akhir tahun yang disampaikan keseluruh OPD untuk memperketat batas waktu pencairan SP2D akhir tahun dan proses pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan (UP) pada akhir tahun serta pengembalian sisa UP. Unsur SPI pada penelitian ini juga merujuk pada COSO: “lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan”. Hasil opini dari BPK terhadap LKPD setiap akhir tahun pelaporan akan menjadi umpan balik bagi pemerintah mengenai informasi keuangan yang disampaikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan secara manual memerlukan waktu yang lumayan panjang sebab keberagaman pelaporan masing-masing perangkat daerah selaku entitas akuntansi. Ada lebih banyak ruang kesalahan dan salah saji dalam akun keuangan karena hal ini. Untuk memenuhi tuntutan keuangan yang terus meningkat, pemerintah daerah didesak untuk membuat program berbasis internet dan intranet untuk membantu pengelolaan keuangan berkat pertumbuhan TI yang eksponensial.

Pemerintah Kota Palembang telah menggunakan sistem digitalisasi untuk semua transaksi, baik belanja maupun pendapatan. BPKAD selaku entitas akuntansi dan sekaligus sebagai entitas pelaporan keuangan Kota Palembang menggunakan sistem digital ini sesuai Keppres No.3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Namun demikian, bukan berarti mengabaikan peran SAKD. Akuntansi di SAKD diatur oleh serangkaian kebijakan, standar, dan prosedur yang dirancang untuk menyediakan data keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada daerah. Untuk itu, kajian ini akan membahas keberadaan SAKD dalam kaitannya dengan kualitas informasi laporan keuangan kota Palembang.

Teori keagenan mengacu pada hubungan antara prinsipal dan agen di mana prinsipal menyerahkan kuasa terhadap agen guna bertindak atas nama prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini selanjutnya digunakan juga di lingkungan entitas publik yang mendeskripsikan antara pemerintah (pengelola) dengan masyarakat (prinsipal). Sebagai agen, pemerintah daerah secara moral bertanggung jawab memaksimalkan pendapatan daerah, namun di sisi lain pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tentu saja dapat memicu ketidaksimetrian informasi yang kemungkinan besar pengelola tidak selalu menjalankan dan melakukan sistem pemerintahan yang baik untuk kepentingan prinsipal (Halim, 2016).

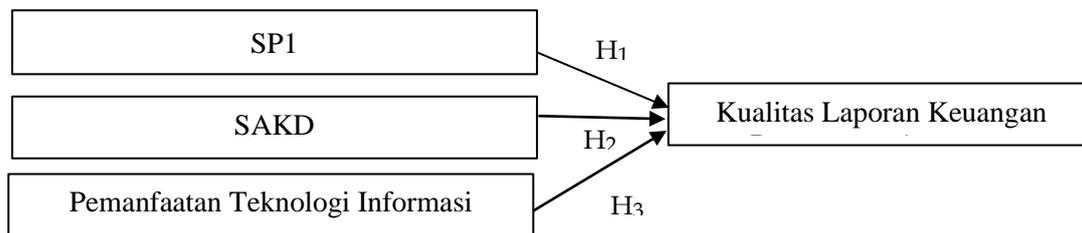
Pengumpulan data, proses pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan merupakan bagian dari SAKD dan berkontribusi pada produksi pelaporan keuangan yang berkualitas. Dalam Permendagri No. 59/2007, Untuk keperluan pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, SAKD adalah sistem akuntansi yang terbagi jadi kumpulan kebijakan, standar, dan tahapan yang menciptakan pelaporan keuangan dapat dipercaya, sesuai, dan akurat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pane (2018), SAKD mempunyai dampak yang menguntungkan pada kredibilitas laporan keuangan.

Sesuai dengan PP No. 71/2010, laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna menyediakan data berkualitas yang bisa digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki kualitas yang diharapkan tepat waktu, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami. Faktor-faktor seperti penerapan SAKD, pengendalian internal, dan pemanfaatan TI semuanya dapat berdampak pada keakuratan laporan keuangan pemerintah daerah (Chodijah & Hidayah, 2018), maka dibuat hipotesis:

H₂: SAKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku entitas akan menghasilkan perilaku berbeda. Hal ini sesuai dengan teori kontigensi sebagaimana dikemukakan Luthans & Stewart (1977), Gasperz (2019). Sehubungan dengan sistem informasi akuntansi berkaitan dengan dampak teknologi, lingkungan dan struktur organisasi. Kemampuan teknologi pada praktik teknis termasuk lingkungan teknologi. Lingkungan TI yang digunakan berdampak pada praktik dan operasi entitas. Pemrosesan data, pengambilan data, kompilasi data, dan penyimpanan data adalah semua aspek TI yang berkontribusi pada pembuatan data yang andal. Komputer (baik besar maupun kecil), program (dapat diunduh dan diinstal), basis data, jaringan (baik publik maupun pribadi), dan perdagangan elektronik adalah bagian dari bidang TI yang lebih luas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas untuk menampung lebih banyak data, penyusunan laporan keuangan dan pemutakhiran informasi keuangan menjadi lebih sederhana dengan pertumbuhan TI. Menurut penelitian Wardani & Andriyani (2017), menggunakan TI (komputer dan jaringan) untuk pemrosesan data memiliki berbagai manfaat, termasuk peningkatan presisi dalam hasil operasional dan kemampuan untuk melakukan banyak tugas sekaligus. Hipotesis yang diajukan:

H₃: Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.



Gambar 1. Model Penelitian.

METODE PENELITIAN

Bersifat kuantitatif, riset ini bersumber data primer. Populasi riset ialah semua pegawai/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang akuntansi, bidang pembendaharaan daerah, bidang pengelolaan aset dan bidang anggaran daerah di BPKAD kota Palembang sejumlah 71 orang. Sampel jenuh digunakan, namun hanya 65 orang (responden) yang mengembalikan kuesioner. Variabel penelitian terdiri tiga variabel independen dan satu dependen.

Kualitas laporan keuangan merujuk pada PP 71/2010 dengan dimensi: relevan (empat indikator), andal (empat indikator), dapat dibandingkan (dua indikator), dan dapat dipahami (dua indikator). Definisi operasional SPI merujuk pada PP No.60/2008, terdiri lima dimensi: lingkungan pengendalian (dua indikator), penilaian risiko (dua indikator), kegiatan pengendalian (tiga indikator), informasi dan komunikasi (tiga indikator) serta pemantauan (dua indikator). Definisi SAKD merujuk pada permendagri No. 59/2007 yaitu serangkaian prosedur hingga menghasilkan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. SAKD diukur menggunakan dimensi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan, masing-masing dimensi memuat empat indikator (pencatatan), tiga indikator untuk dimensi pengikhtisaran dan satu indikator. Pemanfaatan TI merujuk pada Sawyer et al., (2003) dan Yusnita (2017) dengan dimensi teknologi informasi komputer dijabarkan ke dalam tujuh indikator.

Analisis data menggunakan regresi dengan model persamaan, yaitu:

$$KLP = a + b_1SPI + b_2SAKD + b_3TPI + e$$

KLP = Kualitas Laporan Keuangan
 SPI = Sistem Pengendalian Internal
 SAKD = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 PTI = Pemanfaatan Teknologi informasi
 a = Konstanta
 b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi .
 e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari 71 eksemplar daftar pertanyaan disebar kepada responden, yang berhasil dikembalikan sebanyak 65 eksemplar (tingkat pengembalian 91,5%). Profil responden menunjukkan, perempuan berjumlah 34 orang (52,3%) dan laki-laki berjumlah 31 orang (47,7%). Hal ini menunjukkan terjadi kesetaraan gender bahkan perempuan lebih dominan. Rentang usia 27-37 tahun dengan persentase tertinggi (63,1%), ini menunjukkan pegawai pada BPKAD berada pada usia produktif. Tingkat pendidikan jenjang S2 (21,5%) dan S1 (75,4%), sisanya D3 dan SLTA (3,1%).

Analisis Regresi Linear Berganda

Sesuai dengan temuan pengolahan data, didapat hasil regresi linear berganda:

$$Y = 6,617 + 0,544X_1 + 0,171X_2 + 0,481X_3 + e$$

Pengujian Hipotesis

Pengujian Secara Simultan

Uji statistik yang dipakai guna pengujian secara bersamaan yaitu uji F. Hasil pengujian menunjukkan bahwa $F_{hitung} (32,812) > F_{tabel} (2,76)$, alhasil jenjang kekeliruan 5%, ditetapkan SPI, SAKD dan pemanfaatan IT secara bersamaan berdampak pada kualitas laporan keuangan kota Palembang.

Koefisien Determinasi

Setelah dilakukan pengujian, terbukti bahwa SPI, SAKD dan pemanfaatan IT secara bersamaan berdampak pada kualitas laporan keuangan kota Palembang. Selanjutnya dihitung seberapa besar pengaruh ketiga komponen di atas. Dengan berbantuan software SPSS diperoleh adjusted *R square* sebesar 93,9%.

Pengujian Secara Parsial

Uji-t merupakan salah satu jenis analisis statistik yang dilakukan. Tingkat signifikansi 1,199962 ditentukan dengan memakai uji t_{tabel} , tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, 61 derajat kebebasan. Kriteria uji yang dipakai:

$t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Bila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Pembahasan

Sesuai dengan hasil pengujian secara parsial (uji t), SPI memiliki hubungan atau berdampak positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah dengan $t_{hitung} 8,487 > t_{tabel} 1,999$, tingkat sig. $0,000 < 0,05$. Temuan ini memberikan bukti kuat terhadap H_0 dan mendukung H_a . Kualitas pelaporan keuangan meningkat seiring dengan peningkatan implementasi SPI. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa SPI memiliki dampak penting dan bermanfaat terhadap laporan keuangan pemerintah kota Palembang.

Ketika digunakan untuk mengawasi seberapa baik orang melakukan pekerjaan, SPI dapat membantu entitas menghindari *fraud*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SPI Pemerintah Kota Palembang telah berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pimpinan dapat merencanakan pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan menggunakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan perbaikan berdasarkan data yang ada.

Pemerintah Kota Palembang melalui para pegawainya berperan penting melakukan pelaporan keuangan khususnya di BPKAD Kota Palembang. Para pegawai BPKAD terkait tugas dan fungsinya, telah mahir dalam membuat jurnal/catatan untuk setiap transaksi dan telah mengikuti pelatihan sehubungan penatausahaan. Laporan keuangan yang dibuat pada tiap periode didukung dengan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Temuan riset ini memperkuat temuan riset terdahulu yang dilaksanakan Ningrum (2018) dan Kesuma et al. (2017), bahwa SPI berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

Temuan uji hipotesis, SAKD berdampak positif dan sig. pada kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai $t_{hitung} = 2,258$ dan nilai sig. 0,028. Dengan demikian maka, H_0 ditolak atau H_a diterima. Akibatnya, SAKD memiliki efek yang sangat konstruktif terhadap keandalan laporan keuangan. Langkah pertama SAKD adalah pengumpulan data, diikuti dengan pencatatan dan peringkasan data, dan terakhir pelaporan keuangan. Temuan riset ini juga sejalan dengan riset (Nurillah, 2014). Sama halnya dengan penelitian (Pane, 2018) yang menegaskan bahwa SAKD berdampak positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

Nilai t_{hitung} 5,428 dan tingkat signifikansi 0,000, penggunaan TI memiliki hubungan positif yang signifikan, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, dapat dikatakan bahwa ada peningkatan yang nyata dan bermanfaat dalam kualitas laporan keuangan dengan penerapan TI. Dalam hal ini, pegawai BPKAD Kota Palembang telah menggunakan teknologi komputer untuk memperlancar dan mempermudah tugas-tugas dalam membuat laporan keuangan dengan memakai sistem informasi yang terstruktur dan proses akuntansinya juga dilakukan secara komputerisasi. Untuk mengakses data dan informasi yang dibutuhkan, BPKAD Kota Palembang telah menggunakan jaringan internet agar dapat dengan mudah menerima data dan mencari informasi terkait dengan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian (Yuliani & Agustini, 2016), pemanfaatan TI berdampak positif pada kualitas laporan keuangan. Sehubungan dengan penelitian ini, Yuliani & Agustini (2016) menegaskan, pengolahan data dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah akan dipercepat dengan bantuan TI.

SPI, SKAD, dan TI meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang secara signifikan. Temuan ini menguatkan penelitian Yuliani & Agustini (2016). Faktor eksternal memoderasi hubungan antara SPI dan kapabilitas SDM terhadap mutu laporan keuangan, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Yendrawati(2013). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SPI yang lebih kuat menghasilkan pelaporan keuangan pemerintah yang lebih andal.

SIMPULAN

Kualitas laporan keuangan Kota Palembang ditentukan oleh SPI, SAKD, dan TI. Hasil temuan ini berimplikasi bagi BPKAD Kota Palembang untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan pemeliharannya agar informasi-informasi dapat terdata secara baik dan rinci. Sebaiknya BPKAD Kota Palembang perlu meningkatkan kompetensi para pegawai melalui desiminasi, workshop, dan sejenisnya terkait dengan perubahan teknologi dan perubahan peraturan, sehingga pelaksanaan setiap elemen terbaru dapat diikuti dan bermuara pada mutu informasi keuangan yang dihasilkan dari laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Provinsi Dki Jakarta). *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 34–48. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2595>
- Gasperz, Jefry (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Perbankan*. <http://doi:https://doi.org/10.21070JBMP.V5I2>
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behaviour , Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

- Kesuma, P. K., Choirul Anwar, D., & Darmansyah, D. (2017). Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*, 1(2).
- Luthans, Fred, and Todd I Stewart. (1977). A General Contingency Theory of Management. *The Academy of Management Review*. Vol. 2, No. 2 (Apr., 1977), pp. 181-195.
- Ningrum, K. K. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6473>
- Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok [Universitas DIponegoro]. In *Majalah Ilmiah Unikom* (Vol. 15, Issue 2). <https://doi.org/10.34010/miu.v15i2.559>
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Perilaku Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & Scheiner, J. H. (2003). *Sawyer's Internal Auditing: The Practice of Modern Internal Auditing* (5th ed.). Institute Of Internal Auditors.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 165–174. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art7>
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, 14(1), 56–64.
- Yusnita, T. erna. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/598>